

# LAPORAN

Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah  
**(LAKIP) 2024**



Pemerintah  
Kota Pontianak

DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PONTIANAK



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan /atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak

Kami menyadari bahwa LAKIP ini belum menggambarkan kinerja yang ideal. Pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan LAKIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak guna mewujudkan **“good governance”** di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pontianak, 14 Februari 2025

Kepala Dinas komunikasi dan Informatika  
Kota Pontianak



**Drs. ZULKARNAIN, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP 196601271986031009



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas, Fungsi dan wewenang organisasi	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi	1
1.3 Kegiatan dan Produk Organisasi	3
1.4 Struktur Organisasi dan Lingkungan Strategis Organisasi	11
1.5 Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	39
3.2 Realisasi Anggaran	79
Bab IV Penutup	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	83
Lampiran	85



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	2
Tabel 1.2	Logical Frame Work Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	3
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	16
Tabel 1.4	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	20
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2024	28
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Urusan Penunjang Tahun 2024	34
Tabel 3.1	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024	40
Tabel 3.2	Capaian Indeks SPBE Realisasi Tahun 2023 dan Target serta Realisasi Tahun 2024	41
Tabel 3.3	Realisasi Indeks SPBE Berdasarkan Perencanaan Strategis Tahun 2022-2024	42
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi IKU Indeks SPBE DKI Dengan Target Nasional Tahun 2024	43
Tabel 3.5	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024	43
Tabel 3.6	Realisasi Program Anggaran, Capaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi Tahun 2024	44
Tabel 3.7	Capaian Realisasi IKU Tahun 2023 dan Target serta Realisasi IKU Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	73
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Kerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Perencanaan Strategis Tahun 2022-2024	74
Tabel 3.9	Perbandingan IKU antara Realisasi Dengan Target Nasional Tahun 2024	75
Tabel 3.10	Permasalahan dan Solusi	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	11
Gambar 1.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	14
Gambar 1.3	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Pendidikan	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi**

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **1.2 Aspek Strategis Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja per tahunnya.

Kemudian adanya penyesuaian anggaran, Dinas Komunikasi juga telah melakukan revisi Rencana Kerja Tahun 2024 sehingga terjadi penyesuaian target kinerja tahunan menyesuaikan dengan penyesuaian anggaran tersebut dimana beberapa sub kegiatan yang diiadakan yang juga menyebabkan target kinerja menyesuaikan kondisi tersebut.

Selain itu berdasarkan hasil evaluasi tim SAKIP Pemerintah Kota Pontianak, dilakukan revisi atau evaluasi terkait penentuan indikator atau target kinerja kegiatan sehingga dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dilakukan penyesuaian sebagaimana hasil rekomendasi atau evaluasi tersebut.

Sebagaimana tertera pada dokumen-dokumen tersebut, maka aspek strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik
		Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	90,63	93,75	100

Sumber: Data Olahan RENSTRA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026

Tabel.1.2

## Logical Frame Work Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

TUJUAN KOTA PONTIANAK	INDIKATOR TUJUAN KOTA PONTIANAK	TARGET	SASARAN KOTA PONTIANAK (TUJUAN PERANGKAT DAERAH)	IKU KOTA	TARGET IKU	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	A	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	Baik	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Sumber: Data Olahan RENSTRA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026

### 1.3 Kegiatan dan Produk Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, sebagaimana yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - 2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
    - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
    - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    - Pelayanan Informasi Publik
    - Layanan Hubungan Media
    - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
    - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - 3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
    - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
    - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

### 3.2 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

## 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

### 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

## 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 5.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Adanya instruksi untuk melakukan realokasi anggaran, maka program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mengalami perubahan menyesuaikan dengan alokasi anggaran pada APBD Perubahan adalah sebagaimana berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- 2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
  - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Layanan Hubungan Media
  - Manajemen Komunikasi Krisis
  - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
3. Program Aplikasi Informatika
  - 3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
    - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
    - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - 3.2 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
    - Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
    - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
    - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
    - Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
    - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

#### 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

### 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

#### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

#### 5.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Terkait hal tersebut terdapat penambahan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk tahun 2024. Tahun 2023 terdapat 5 program 13 kegiatan dan 49 sub kegiatan terjadi penambahan pada Tahun 2024 menjadi 5 program 13 kegiatan dan 51 sub kegiatan atau bertambah sebanyak 2 sub kegiatan. Ada sub kegiatan yang bertambah dan juga sub kegiatan kegiatan yang berkurang.

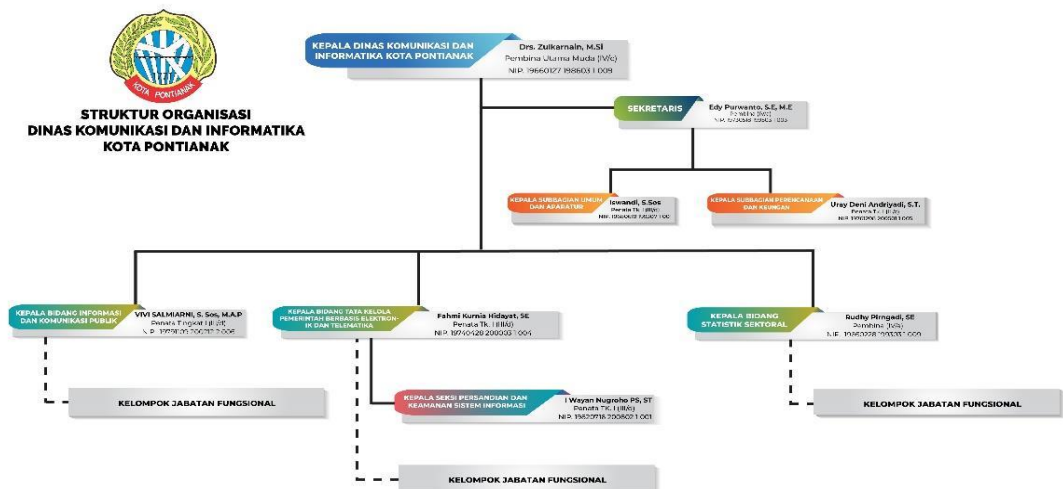
Pada Tahun 2024 ada 2 sub kegiatan yang tidak ada jika dibandingkan Tahun 2023 terdiri dari sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Adapun penambahan kegiatan pada Tahun 2024 sebanyak 4 sub kegiatan terdapat pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan sub kegiatan Pengadaan Mebel dan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

#### 1.4 Struktur Organisasi dan Lingkungan Strategis Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak



Sumber: Subbag Umum dan Aparatur

Sebagaimana tercantum Keputusan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok,



Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik memiliki fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik;
- b. perumusan rencana kerja dibidang informasi dan komunikasi publik;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang informasi dan komunikasi publik;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang informasi dan komunikasi publik;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang informasi dan komunikasi publik;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang informasi dan komunikasi publik;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang informasi dan komunikasi publik;
- h. pengelolaan administrasi dibidang informasi dan komunikasi publik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang informasi dan komunikasi publik yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik dan Telematika memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- b. perumusan rencana kerja dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika;
- h. pengelolaan administrasi dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan telematika yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Statistik Sektoral memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang statistik sektoral;
- b. perumusan rencana kerja dibidang statistik sektoral;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang statistik sektoral;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang statistik sektoral;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang statistik sektoral;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang statistik sektoral;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang statistik sektoral;
- h. pengelolaan administrasi dibidang statistik sektoral; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang statistik sektoral yang diberikan oleh Kepala Dinas.

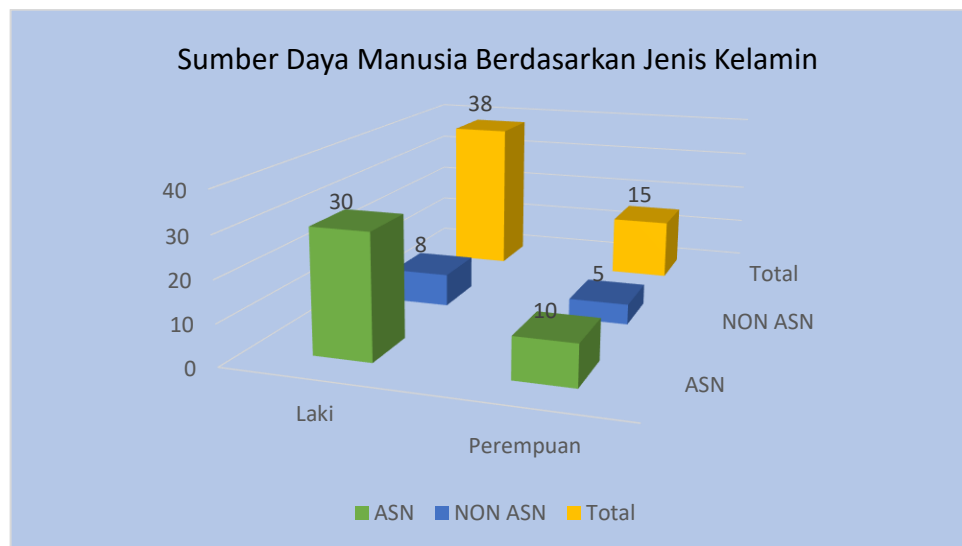
Untuk menjalankan tugas yang telah diamanatkan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak didukung oleh berbagai sumberdaya antara lain Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, serta Anggaran.

a. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak didukung oleh 40 orang ASN dan 13 orang tenaga kontrak atau jasa orang perorangan. Dari 40 orang ASN tersebut terdiri dari 30 orang ASN dengan jenis kelamin laki-laki dan 10 orang ASN dengan jenis kelamin perempuan. Untuk tenaga kontrak atau jasa orang per orangan terdiri dari 8 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan.

Gambar 1.2

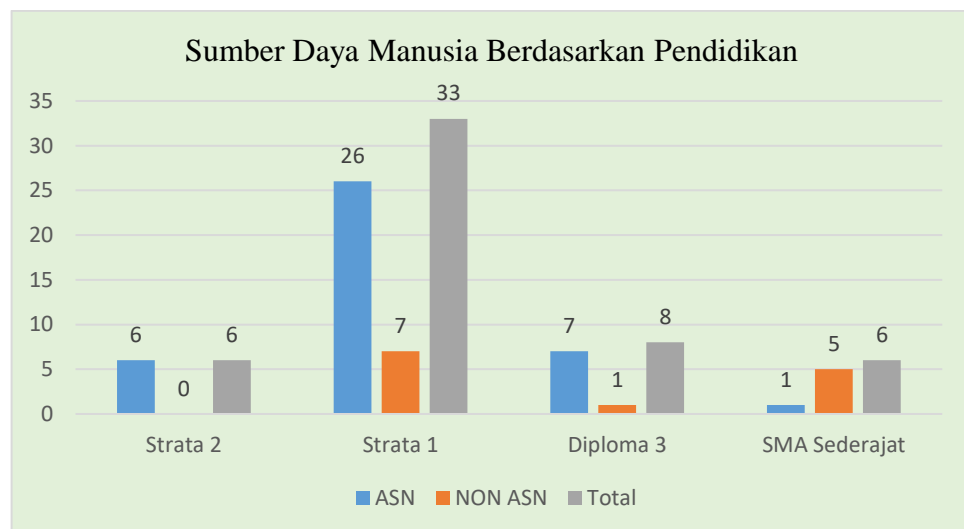
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin



Sumber: Data Olahan Subbag. Umum dan Aparatur

Kemudian berdasarkan pendidikannya, komposisi pegawai/ ASN adalah lulusan S2 sebanyak 6 orang, lulusan S1 sebanyak 27 orang, lulusan diploma sebanyak 7 orang untuk ASN dan lulusan SMA/ sederajat sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk tenaga Non ASN, lulusan S1 sebanyak 7 orang, lulusan D3 sebanyak 1 orang dan lulusan SMA sederajat sebanyak 5 orang.

Gambar 1.3  
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Pendidikan



Sumber: Data Olahan Subbag Umum dan Aparatur

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3  
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

<b>NO</b>	<b>NAMA BIDANG BARANG</b>	<b>SATUAN</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Portable Compressor	Unit	1
2	Mesin Bor Beton	Unit	1
3	Mobil Station Wagon	Unit	1
4	Sepeda Motor	Unit	1
5	Mesin Gerinda Tangan	Unit	1
6	Mesin Bor Tangan	Unit	1
7	Tool Kit Box	Unit	1
8	Special Tools	Unit	2
9	Perkakas Bengkel	Unit	2
10	Alat Ukur Universal (Multimeter)	Unit	1
11	Alat Ukur/Pembanding	Unit	1
12	Alat Ukur Lain-lain	Unit	2
13	Mesin Absen	Unit	6
14	Mesin Fotokopi Folio	Unit	1
15	Mesin Hitung lainnya	Unit	1
16	Lemari Besi / Metal	Unit	5
17	Rak Besi	Unit	4
18	Filling Cabinet Besi	Unit	12
19	Brankas	Unit	1
20	Lemari Kaca	Unit	1
21	CCTV	Unit	5
22	Alat Kantor Lainnya	Unit	123
23	White Board	Unit	1
24	Alat Penghancur Kertas	Unit	1
25	Alat Pengaman Sinyal	Unit	1
26	Papan Tulis	Unit	1
27	Alat Kantor Lainnya	Unit	123
28	Kursi Besi / Metal	Unit	2
29	Meja Panjang	Unit	2

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
30	Meja ½ Biro	Unit	10
31	Kursi Rapat	Unit	71
32	Kursi Tamu	Unit	50
33	Kursi Putar	Unit	22
34	Meja Komputer	Unit	2
35	Sofa	Unit	2
36	Meubelair Lainnya	Unit	3
37	Mesin Penghisap Debu	Unit	1
38	AC Window	Unit	14
39	Ac Split	Unit	7
40	Alat Pendingin Lainnya	Unit	2
41	Televisi	Unit	49
42	Amplifier	Unit	1
43	Sound System	Unit	1
44	Unit Power Supply	Unit	1
45	Stabilisator	Unit	9
46	Camera Video	Unit	1
47	Tustel	Unit	6
48	Tangga Aluminium	Unit	1
49	Dispenser	Unit	4
50	Gordyn / Kray	Unit	3
51	Alat Pemadam Portable	Unit	5
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	2
54	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Unit	4
55	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	Unit	37
56	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Unit	1
57	Meja Operator	Unit	5
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	1
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Unit	11
61	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	32

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
62	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Unit	15
63	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Unit	10
64	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	Unit	1
65	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Unit	25
66	Lemari lainnya	Unit	2
67	Audio Amplifier	Unit	1
68	Microphone / Wireless Mic	Unit	2
69	Power Amplifier	Unit	1
70	Cable	Unit	1
71	Peralatan Studio Audio Lainnya	Unit	16
72	Video Distribution Amplifier	Unit	5
73	Head Set	Unit	5
74	Video Monitor	Unit	1
75	Video Tape Recorder Portable	Unit	1
76	LCD Monitor	Unit	1
77	Video Mixer	Unit	1
78	Video Switcher	Unit	22
79	Camera Conference	Unit	1
80	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	Unit	21
81	Video Patch panel	Unit	1
82	Tripod Camera	Unit	3
83	Lighting Stand Tripod	Unit	1
84	Lensa Camera	Unit	2
85	Handy Talky	Unit	10
85	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Unit	2
86	Antena SHF Portable	Unit	5
87	Mainframe (Komputer Jaringan)	Unit	4
88	Mini Komputer	Unit	2
89	PC Unit	Unit	67
90	Laptop	Unit	14
91	Notebook	Unit	1
92	Hard Disk	Unit	10

NO	NAMA BIDANG BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
93	Peralatan Mainframe Lainnya	Unit	6
94	Monitor	Unit	4
95	Printer	Unit	40
96	External / Pportable Hardisk	Unit	40
97	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	83
98	Server	Unit	18
99	Router	Unit	1
100	Hub	Unit	3
101	Kabel UTP	Unit	4
101	Wireless Access Point	Unit	4
102	Switch	Unit	2
103	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	43
104	Peralatan Komputer Lainnya	Unit	1
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1
106	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Unit	1
107	Bangunan Menara Antena Microwave / Parabolic	Unit	1
<b>JUMLAH</b>			<b>1.020</b>

c. Anggaran

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, maka pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.771.587.706,- (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah). Kemudian dengan adanya anggaran perubahan menjadi Rp 12.972.266.525,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel 1.4.



Tabel 1.4  
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.771.587.706</b>	<b>12.972.266.525</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.607.483.747</b>	<b>11.394.816.316</b>
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.969.057.706	5.967.826.525
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.638.426.041	5.426.989.791
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.164.103.959</b>	<b>1.577.450.209</b>
5.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.114.103.959	1.577.450.209
5.2.6	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	50.000.000	-

### 1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 disajikan berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Lampiran II. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai berikut:

- BAB I           PENDAHULUAN
  - 1.1    Tugas, Fungsi dan Wewenang
  - 1.2    Aspek Strategis
  - 1.3    Kegiatan dan Produk Organisasi
  - 1.4    Struktur Organisasi dan Lingkungan Strategis Organisasi
  - 1.5    Sistematika Penyajian
- BAB II        PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
  - 2.1    Rencana Strategis
  - 2.2    Perjanjian Kinerja
- BAB III       AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2024-2026 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah

setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah :

**“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”**

Maksud dari visi tersebut adalah:

**Kota Khatulistiwa**

Kota Pontianak merupakan kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa

**Berwawasan lingkungan**

memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

**Terdepan**

mengacu pada upaya dan harapan Kota Pontianak untuk menjadi yang paling unggul atau terbaik dalam berbagai aspek, khususnya di Kalimantan.

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor

10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

Misi Pertama	Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
Misi Kedua	Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
Misi Ketiga	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib
Misi Keempat	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
Misi Kelima	Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mengampu misi 3 Pemerintah Kota Pontianak yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik (Good Governance), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib

### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan perangkat daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan Pemerintah Kota Pontianak yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun masa perencanaan. Dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024-2026, serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Perumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 harus disinergikan dengan tujuan Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran Pemerintah Kota adalah Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menetapkan tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2024-2026. Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah pencapaian sasaran Pemerintah Kota Pontianak untuk Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### 2.1.2 Strategis dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka dilaksanakan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan melalui arah kebijakan dan program sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis yaitu Peningkatan penerapan digitalisasi birokrasi, informasi dan layanan publik

**Tujuan** :

Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

**Sasaran** :

Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

**Arah Kebijakan:**

1. Peningkatan Kebijakan internal dan tatakelola pemerintah berbasis elektronik
2. Peningkatan infrastruktur pendukung TI dan Persandian
3. Peningkatan pemenuhan layanan informasi dan komunikasi public
4. Peningkatan penyediaan data prioritas sektoral dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi satu data

**Program :**

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**2.2. Perjanjian Kinerja**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Target dari indikator kinerja sasaran



program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan.

Satuan kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Kegiatan dan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1, dan tabel 2.2.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak**  
**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2024**

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	
			Tahun 2024	
			Target Kinerja	PAGU (Rp)
1	2	3	4	6
Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	Persen	90,63	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	Persen	95,52	3.697.364.677,00
1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1 Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	32	906.845.122,00

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		
						Tahun 2024		
						Target Kinerja	PAGU (Rp)	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.	1.	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	dokumen	1	126.480.000,00	
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.	2.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	1	780.365.122,00	
2	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	2.	<b>Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE</b>		<b>Perangkat Daerah</b>	<b>32</b>	<b>2.790.519.555,00</b>	
	1.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	2.	1.	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	1	2.466.323.715,00
	2.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.	2.	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	3	56.385.840,00
	3.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.	3.	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan	5	67.170.000,00
	4.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.	4.	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	1	52.250.000,00

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		
						Tahun 2024		
						Target Kinerja	PAGU (Rp)	
5.	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.	5.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	1	53.960.000,00	
6.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2.	6.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	dokumen	1	94.430.000,00	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah</b>			<b>Persen</b>	<b>21,88</b>	<b>141.118.000,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>3. rsentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)</b>			<b>Persen</b>	<b>26,87</b>	<b>131.118.000,00</b>	
	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.	1.	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	dokumen	1	7.000.000,00
	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.	2.	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	laporan	1	12.000.000,00

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2024	
						Target Kinerja	PAGU (Rp)
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3.	3.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	1	109.668.000
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.	4.	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	5	2.450.000
4.	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	4.		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi</b>	<b>persen</b>	<b>47,88</b>	<b>10.000.000</b>
1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4.	1.	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	5	10.000.000
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik</b>			<b>persen</b>	<b>70</b>	<b>638.003.540,00</b>
5.	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	5.		<b>Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat</b>	<b>Media</b>	<b>13</b>	<b>638.003.540,00</b>
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5.	1.	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	4	41.782.000,00

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2024	
						Target Kinerja	PAGU (Rp)
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.	1.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	12	235.866.500,00
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.	2.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	2	36.840.000,00
4	Pelayanan Informasi Publik	5.	3.	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	12	68.857.640,00
5	Layanan Hubungan Media	5.	4.	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	4	149.070.000,00
6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5.	5.	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	dokumen	2	76.435.600,00
7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	5.	7.	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	dokumen	1	29.151.800,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		<b>Persentase pemenuhan data prioritas daerah</b>			<b>persen</b>	<b>53,85</b>	<b>372.400.800,00</b>
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>6.</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota</b>		<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>372.400.800,00</b>
6.	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6.	1.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	3	51.285.000,00

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2024	
						Target Kinerja	PAGU (Rp)
2.	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6.	2.	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	32	31.706.000,00
3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	6.	3.	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	2	46.470.500,00
4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	6.	4.	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	32	57.160.800,00
5.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	6.	5.	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	3	185.778.500,00

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak**  
**Urusan Penunjang Tahun 2024**

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Tahun 2024	
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)
1		2	3	4	5
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		<b>Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>	<b>8.123.379.508,00</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>38.039.900,00</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	11.607.900,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.489.800,00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.000.600,00
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	7.179.200,00
	5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	5.762.400,00

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Tahun 2024		
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>5.838.852.925,00</b>
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	31	5.633.066.525,00
	2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	198.221.600,00
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.407.400,00
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	12	5.157.400,00
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>81.207.000,00</b>
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	62.280.000,00
	2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	3	18.927.000,00
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>429.670.840,00</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.850.840,00



URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Tahun 2024		
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5	78.170.200	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	99.635.000,00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	27.017.800,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	7.420.000,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	190.627.000,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	17.950.000,00	
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>557.600.195,00</b>	
	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	16	20.426.800,00
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	20	537.173.395,00
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.067.288.648,00</b>	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.221.600,00

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Tahun 2024	
				Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	786.590.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	275.477.048,00
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>110.720.000,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	37.900.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	92	62.670.000,00
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	1	10.150.000,00

Total dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.972.266.525,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), sudah termasuk Gaji dan Tunjangan Pegawai.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam tahun 2024 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh atau dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja (output), realisasi, persentase capaian target kinerja, program dan kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program dan kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melaksanakan Pengukuran Kinerja yang mengacu pada penilaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA).

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2024-2026, dimana Sasaran tersebut adalah Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dimana sasaran tersebut untuk memperoleh Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

#### Tujuan Perangkat Daerah :

- ✓ **Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.**

#### 1. **Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. Adapun capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  
Tahun 2024

No	Tujuan PD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Baik	Baik	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yakni Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan IKU berupa Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki target pada tahun 2024 yaitu Indeks Baik. Berdasarkan hasil penilaian 4 domain evaluasi SPBE, yaitu:

1. Domain Kebijakan
2. Domain Tata Kelola SPBE
3. Domain Manajemen SPBE
4. Domain Layanan SPBE,

Maka diperolehlah realisasi Indeks Baik sesuai dengan target yang diinginkan, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%.

## **2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu.**

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2023 dengan Tahun 2024 terjadi peningkatan dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 3.2  
Capaian Indeks SPBE Realisasi Tahun 2023 dan  
Target serta Realisasi Tahun 2024

No	Tujuan PD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik (3,43)	Baik (3,43)	Baik (3,49)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tujuan Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 3,43 Indeks Baik, terjadi peningkatan pada tahun 2024 menjadi 3,49 Indeks Baik dari target sebesar 3,43 Indeks Baik. Peningkatan yang terjadi pada nilai Indeks SPBE ini terdapat pada nilai Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, dan Domain Layanan SPBE.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Capaian kinerja indeks SPBE berdasarkan dokumen perencanaan strategis dari tahun 2024-2026 terdapat beberapa faktor penunjang dalam peningkatan nilai Indeks SPBE, meliputi : aspek Perencanaan Strategis SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari adanya penerapan aspek Perencanaan Strategis SPBE yang umumnya sudah di reviu dan evaluasi, kemudian pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terlihat pada

penggunaan aplikasi berbagi pakai dan adanya integrasi antar aplikasi dengan aplikasi umum berbagi pakai lainnya pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan SIPD, dan kearsipan melalui SRIKANDI sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Begitu pula pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat dengan adanya penggunaan aplikasi SPAN-LAPOR dan JDIH yang juga merupakan aplikasi berbagi pakai yang sudah terintegrasi dengan aplikasi berbagi pakai lainnya.

Tabel. 3.3  
Realisasi Indeks SPBE Berdasarkan Perencanaan Strategis  
Tahun 2022-2024

No	Tujuan PD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi				Target 2024
			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik (3,31)	Baik (3,28)	Baik (3,43)	Baik (3,49)	Baik (3,43)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Indeks SPBE untuk Tahun 2021 sebesar 3,31 terjadi penurunan pada Tahun 2022 sebesar 3,28, sedangkan untuk Tahun 2023 terjadi peningkatan Kembali menjadi 3,43.dan pada tahun 2024 sebesar 3,49.

#### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Penilaian Indeks SPBE apabila dilihat perbandingan dengan nilai Tingkat Nasional maka penilaiannya telah tercapai, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel. 3.4  
Perbandingan Realisasi IKU Indeks SPBE DKI Dengan  
Target Nasional Tahun 2024

No	Tujuan PD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024	Target Nasional
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,49	2,79

Realisasi pada Tahun 2024 pada Penilaian Indeks SPBE sebesar 3,49 jika dibandingkan dengan Target Nasional pada Tahun 2024 sebesar 2,79 maka penilaian Indeks SPBE telah melampaui dari target Tingkat Nasional maupun dari target Tingkat Kota, dimana untuk Tingkat Kota nilai Indeks SPBE sebesar 2,50.

**Saasaran Perangkat Daerah :**

- ✓ **Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**

**1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. Adapun capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  
Tahun 2024



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	Persen	90,63	96,88	106,90

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Sasaran Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika yakni Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sedangkan untuk IKU berupa Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik ditargetkan Tahun 2024 dengan nilai 90,63% dengan realisasi sebesar 90,63% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%

#### a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian Tingkat realiasi kinerja program dan realisasi anggaran program maka dapat dilihat dan dikategorikan pada Tingkat Efisien tercapai dan tidak tercapai, untuk melihat uraiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6  
Realisasi Program Anggaran, Capaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.697.364.677	3.582.876.179	96,90	102,07	efisien
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	638.003.540	607.494.107	95.52	141.40	efisien
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	372.400.800	369.900.700	99.33	118.89	efisien

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Penyelenggara Persandian Untuk Pengamanan Informasi	141.118.000	125.999.614	89,29	100	efisien

Dilihat pada tabel diatas dapat dilihat untuk realiasi anggaran program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 96.9% atau sebesar Rp. 3.582.876.179 dari target anggaran sebesar Rp. 3.697.364.677 dengan capaian kinerja 102,07% dan bisa dikategorikan efisiensi hal ini disebabkan realisasi kinerja sebesar 97,50% melebihi dari target kinerja sebesar 95,52%.

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 638.003.540 dan dan terealisasi sebesar Rp. 607.494.107 atau 95.52% dengan capaian kinerja sebesar 141.40%, dan dikategorikan efisien disebabkan target kinerja 70% dapat terealisasi sebesar 98,98%, terpenuhi semua serta melebihi target yang ada sehingga dapat dikategorikan program ini efisien.

Dalam pencapaian Tingkat efisiensi dapat dilihat dari target kinerja program dan penggunaan anggaran untuk tahun 2024, dimana pencapaian target kinerja program tersebut dapat dikategorikan Efisien, hal ini dapat dilihat dimana capaian kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencapai 118,89% sementara realiasi keuangannya dibawah 100% yaitu sebesar 99,33% dimana target anggaran sebesar Rp 372.400.800 dan terealisasi sebesar Rp 369.900.700 sehingga dapat di kategorikan program ini efisien.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dialokasikan anggaran sebesar Rp.141.118.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.125.999.641,00 atau 89,29% dengan capaian kinerja sebesar 100%,

dan dikategorikan efisien disebabkan target kinerja 21,88% dapat terpenuhi semua.

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk meningkatkan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang aman efektif dan efisien didukung oleh program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoraldan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

• **Program Aplikasi Informatika**

Pada Program Aplikasi Informatika dengan indikator Kinerja berupa Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE, dengan rumusan:

$$= \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan SPBE}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Untuk tahun anggaran 2024, jumlah perangkat daerah yang menerapkan SPBE adalah sebanyak 30 Perangkat Daerah dari total perangkat daerah sebanyak 32 perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak atau sebesar 93,75%.

Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk program pengelolaan aplikasi informatika adalah sebesar 97,50%. Sedangkan target kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 95,52%. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{97,50}{95,52} \times 100\% = 102,07\%$$

Untuk program Pengelolaan Aplikasi Informatika didukung oleh 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah ditargetkan sebanyak 32 domain/sub domain dengan realisasi sebesar 100% atau 32 domain/sub domain.

Dari kegiatan ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan, meliputi :

- 1.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja pada indikator sub kegiatan ini adalah jumlah domain/sub domain pemerintah daerah yang dikelola sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebesar 100%.

Selain itu juga dilakukan propagasi layanan aplikasi dari usulan setiap Perangkat Daerah.

- 1.2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator pada kegiatan ini adalah Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebanyak 1 unit atau 100%. telah dilakukan koneksi jaringan lokal antar OPD dan pada tahun 2024 telah terkoneksi jalur antar OPD sebanyak 6 Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari kegiatan ini terlaksananya Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi sebanyak 30 Perangkat Daerah dari 32 Perangkat Daerah yang di targetkan atau 93,75%.

Dari kegiatan ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan, meliputi :

### 2.1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Indikator pada kegiatan jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah dengan target sebanyak 1 unit dan terealisasi sebesar 1 unit atau 100%. Selain itu juga dilakukan fasilitas layanan pusat data seperti celection, hosting tempat penyimpanan aplikasi dan internet.

### 2.2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator pada kegiatan dengan Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan sebanyak 3 unit dan terealisasi sebesar 100% dari target sebanyak 3 unit. Adapun peningkatan aplikasi terdiri dari Elektronik Renumerasi Kinerja (ERK), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)



### 2.3. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Indikator pada kegiatan ini adalah Jumlah Aplikasi/Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebanyak 5 layanan atau 100%. Adanya penambahan integrasi aplikasi melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP) daerah yaitu aplikasi Jepin dan berita pada Website Pemkot.



### 2.4. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Indikator pada kegiatan Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City, dengan realisasi kinerja sebanyak 100% atau 1 dokumen. Dalam menunjang kegiatan pelaksanaan smart city telah dilakukan evaluasi sebanyak 2 kali. Evaluasi Penyelenggaraan dan implementasi smart city meliputi 6 dimensi yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society; dan smart environment. selain itu setiap tahunnya ditetapkan 1 program quick win disetiap 6 dimensi smart city. Adapun kegiatan penunjang dalam dari pelaksanaan smart city.

- Focus Group Discussion Implementasi Pontianak Smart City bersama Tim Teknis Pontianak Smart City dan Perangkat Daerah terkait, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024.



- Rapat Koordinasi Evaluasi Smart City dan pemilihan Program Quick Win Smart City Tahun 2024 dan Persiapan Evaluasi Smart City Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024



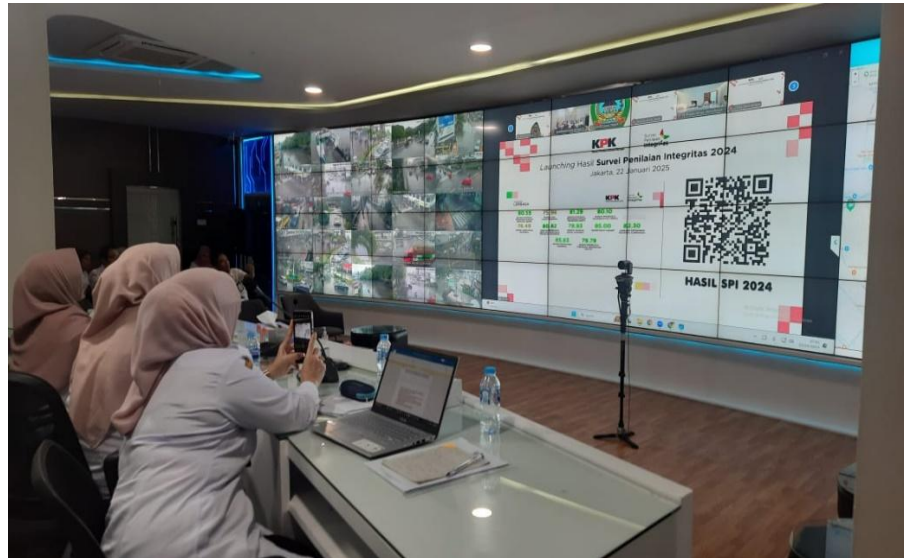
- Penilaian Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Tahap I oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia beserta Tim Penilai Pusat, tanggal 24 Juni 2024





## 2.5. Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah, sebanyak 1 dokumen atau 100%. Telah dilaksanakannya penyediaan layanan secara virtual pada ruang Pontive Center selama 12 bulan.



## 2.6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE dengan capaian sebesar 100% atau 1 dokumen. Selain itu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan evaluasi internal SPBE dalam menunjang penilaian SPBE, seperti :

Evaluasi Mandiri SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus dan 8 Agustus 2024.





Dilakukan Interview Evaluasi SPBE Tahun 2024 oleh Tim Evaluator Eksternal Pusat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024



Penyusunan Arsitektur SPBE Kota Pontianak serta Penerapan Interoperabilitas Layanan Elektronik, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Maret 2024.



Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada aplikasi/sistem informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024.



Pelaksanaan Rapat koordinasi pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola TIK yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli dan 11 Juli Tahun 2024.







- **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik memiliki Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana indikator kinerjanya yaitu Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat, dimana ada 13 Jenis Sarana / Media Komunikasi yang di targetkan dan dapat tercapai semua atau terealisasi sebesar 100% dan target Anggaran tercapai sebesar 95,52%.

Pada tahun 2024, untuk program Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai target kinerja 70% dan realisasi kinerjanya adalah sebesar 98,98% jadi capaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebesar 141,40%. Dilihat dari Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja, terjadi tingkat efisiensi anggaran yang baik dari Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan serta 7 (tujuh) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja 141,40%. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan, terdiri dari:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Capaian kinerja pada kegiatan ini terlaksananya jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada Masyarakat sebanyak 13 informasi atau 100%.

1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Keluaran pada sub kegiatan ini terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Analisa Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sebanyak 4 dokumen dengan capaian 100%.

1.2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Capaian pada sub kegiatan ini terlaksananya jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi sebesar 100% atau sebanyak 12 dokumen. Adapun jumlah postingan menurut jenis konten selama 12 bulan dapat dilihat sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Berita Naik	Jumlah Berita Tidak Naik	Jumlah Views
Januari	33	0	595
Februari	31	1	1.673
Maret	52	1	5.354
April	56	0	20.358
Mei	47	2	5.637
Juni	5	0	563
Juli	41	1	9.046
Agustus	74	2	9.399
September	47	4	8.234
Oktober	45	3	6.587
November	34	1	5.501
Desember	48	0	9.309
TOTAL	513	15	82.256

Tabel 2.1 Rekapitulasi Konten Informasi Berdasarkan Tema

NO	TEMA	BULAN												TOTAL PER TEMA
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Hiburan	1	1	1	1	0	0	0	4	0	1	1	0	10
2	Umum	4	5	5	8	5	4	3	4	4	0	8	3	50
3	Pemilu	5	4	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	16
4	Stunting	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	7
5	Wisata	3	2	5	6	2	2	2	9	7	0	0	0	38
6	TPID	4	2	2	1	0	3	0	0	0	0	2	3	14
7	Musrenbang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Lapor!	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	8
9	Kesehatan	1	0	1	1	0	1	5	4	5	2	1	0	21
10	Prestasi	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	5
11	OPD	2	0	4	5	8	5	1	8	12	7	5	3	57
12	Ucapan	2	5	5	7	8	8	8	4	12	10	4	5	73
13	PPID	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4
14	Korupsi	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	4	1	8
15	Narkoba	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
16	Ketertiban	0	1	5	5	3	6	8	2	2	0	4	3	36
17	Special Event	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	1	7	30
	TOTAL PER BULAN / TAHUN	27	25	34	35	30	29	27	38	51	47	38	32	413



### 1.3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi sebesar 100% atau 2 dokumen.

### 1.4. Pelayanan Informasi Publik

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen atau 100%.

### 1.5. Layanan Hubungan Media

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya jumlah siaran pers yang dilakukan sebanyak 4 layanan atau 100%. Sub kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada Masyarakat tentang informasi Pembangunan Kota Pontianak, melalui siaran pers berupa iklan layanan masyarakat yang bekerjasama dengan Radio Mujahidin, Radio Sonora dan I News TV dan Videotron.

### 1.6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah dengan capaian sebesar 100% dari target sebanyak 2 dokumen.

- Pelatihan Pemanfaatan Platform Digital Kemitraan Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Pontianak yang diikuti kurang lebih 100 orang peserta utusan dari Komunitas KIM yang ada di Pontianak.





### 1.7. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini terlaksananya jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%.

- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Pada program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki indikator kinerja berupa Presentase tingkat terselenggaranya Statistik Sektoral Kota Pontianak, terdiri dari Indikator Penilaian Data Statistik Sektoral.

Capaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100}{500} = 100\%$$

Target Kinerja program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2024 sebesar 100% dapat dicapai dan capaian realisasi program penyelenggaraan statistik sektoral adalah sebesar 100%. Sehingga untuk kinerja 2024 adalah sebesar 100%.

Dalam menunjang pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan sebanyak 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja pada kegiatan ini terlaksananya jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate sebanyak 1.200 data dengan capaian kinerja sebesar 100%.

1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini terlaksananya jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan capaian kinerja sebesar 100% atau sebanyak 3 dokumen. Adapun dokumen yang telah tersusun yakni dokumen Updating Data Statistik Sektoral Tahun 2024, dokumen Daerah Dalam Angka (DDA) Tahun 2024 bekerjasama dengan BPS Kota dan dokumen Data Dinamis Kota Pontianak Tahun 2024.

Untuk mendukung sub kegiatan ini, telah dilaksanakan rapat bersama perangkat daerah sebagai walidata pendukung atau produsen data dan BPS Kota Pontianak selaku Pembina data Kota Pontianak. Rapat tersebut yaitu: Rapat Persiapan Penyusunan Daerah Dalam Angka Kota Pontianak Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024; Rapat Koordinasi Penyusunan Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024; Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Data Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024; Rapat Pengisian Data Dukung dalam Rangka Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kota Pontianak tanggal 4 Oktober 2024; Rapat Koordinasi

Walidata Kota Pontianak tanggal 10 Oktober 2024 dan Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Satu Data Kota Pontianak Tahun 2024-2026 tanggal 29 Oktober 2024.

- Rapat Koordinasi dalam rangka fasilitasi pengumpulan data Daerah Dalam Angka (DDA) Tahun 2024 bersama Badan Pusat Statistik Kota Pontianak tanggal 30 Januari 2024.



#### 1.2. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini terlaksananya Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun dengan capaian sebesar 100% atau 2 dokumen. Adapaun dokumennya terdiri dari dokumen metadata indikator tahun 2024 dan metadata kegiatan tahun 2024. Untuk mendukung sub kegiatan ini telah dilaksanakan rapat bersama pengelola data perangkat daerah dengan BPS Kota Pontianak sebagai narasumbernya, sebagai berikut: Rapat Internalisasi Metadata Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 29 April 2024; Rapat Penyusunan Metadata Statistik Sektoral dan Standar Data Statistik Nasional di Diskominfo Kota Pontianak pada tanggal 21 Juni 2024; Rapat Penyusunan Publikasi

Metadata Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 26 Juni 2024.

- Rapat Diseminasi dan Evaluasi Metadata Statistik Sektoral Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 pada tanggal 11 September 2024.



- 1.3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral  
Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini terlaksananya Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS dengan capaian sebesar 100% atau sebanyak 32 OPD. Tahun 2024 terlaksananya Bimbingan Teknis Identifikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada Aplikasi SIPD e-Walidata Kota Pontianak Tahun 2024 pada tanggal 28 Pebruari 2024; Bimbingan Teknis Pemuktahiran Data Statistik Sektoral OPD Kota Pontianak Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024; Sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Pontianak tanggal 31 Juli 2024.



- Bimbingan Teknis Peningkatan Akurasi Data dan Penjaminan Aktualitas Data Statistik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tanggal 30 Oktober 2024.



1.4. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini dengan terlaksananya Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi capaian sebesar 100% atau 32 orang. Tahun 2024 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Identifikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada aplikasi SIPD e-Walidata Kota Pontianak Tahun 2024 pada tanggal 28 Februari 2024; Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data Statistik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 29 Mei 2024; Kunjungan Kerja TPB EPSS Kota Pontianak Tahun 2024 pada tanggal 25 Juni 2024; Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas Kegiatan Statistik dan Sistem Statistik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 15 Oktober 2024; Bimbingan Teknis Penginputan Metadata Statistik Sektoral Perangkat Daerah ke

dalam Indonesia Data Hub (INDAH) BPS RI pada tanggal 20 November 2024.

- Bimbingan Teknis Persiapan Data Dukung Indikator EPSS Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 pada tanggal 11 Desember 2024



#### 1.5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Capaian Kinerja pada sub kegiatan ini terlaksananya jumlah data Statistik Sektoral yang dihimpun dengan capaian sebesar 100% atau 1 dokumen. Adapun hasil kegiatan dalam menunjang sub kegiatan ini terdiri dari penyusunan profil kota, penyusunan publikasi pedoman penyelenggaraan statistik sektoral, publikasi panduan penggunaan aplikasi E-walidata, Publikasi Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral pada Aplikasi Romantik BPS RI dan Publikasi Penerapan Standar Data Statistik Pemerintah Kota Pontianak serta survey Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak Tahun 2024.

Dalam upaya mendukung terselenggaranya sub kegiatan ini telah dilaksanakan beberapa rapat koordinasi bersama walidata pendukung dan pengelola datanya perangkat daerah dengan didampingi BPS Kota Pontianak sebagai narasumbernya, sebagai berikut: Rapat Evaluasi dan Review Keterisian Data

Prioritas Kota Pontianak Tahun 2023 pada tanggal 6 Maret 2024; Rapat Evaluasi Penerapan Prinsip SDI di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 24 April 2024; Rapat Penyiapan Bukti Dukung Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 pada tanggal 7 Mei 2024; Rapat Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik melalui Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik *Online* (Romantik) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 11-12 Juni 2024; Rapat Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk pada Data Statistik Sektoral Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 30 Juli 2024; Rapat Optimalisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 pada tanggal 24-25 September 2024; Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada Aplikasi E-Walidata SIPD RI pada tanggal 8 November 2024; Rapat Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Walidata Kota Pontianak pada tanggal 6 Desember 2024.

- Sosialisasi Indeks Pembangunan Statistik dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada tanggal 9 Desember 2024.



- **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Pada program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, mempunyai indikator kinerja Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi.

Untuk program Penyelenggaraan Persandian dimana Pengamanan Informasi, hasil Self Assesment Indeks KAMI yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah Baik.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dari program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dan dijabarkan dalam 5 (lima) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari Indikator kegiatan ini jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian sebanyak 1 area atau sebesar 100%.
  - 1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Adapun Indikator sub kegiatan adalah jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah sebanyak 1 dokumen atau 100%. Selain itu

juga telah tersusunnya Draft Peraturan Wali Kota tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

- 1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian indikator pada sub kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebesar 100% atau 1 laporan.

- 1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Keluaran pada kegiatan ini terlaksananya Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebanyak 1 laporan atau 100% dari target. Salah satu kegiatan ini berupa tandatangan elektronik.

- 1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Keluaran pada kegiatan ini terlaksananya jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi tahun 2024 yang ditargetkan sebanyak 5 Perangkat Daerah dan terealisasi 100%, sehingga telah 32 Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Keluaran sub kegiatan ini terlaksananya jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi tahun 2024 ditargetkan sebanyak 5 Perangkat Daerah dan terealisasi

100%, sehingga telah 32 perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi.

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu.

Perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2023 dengan Tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena sasaran ini merupakan baru Dinas Komunikasi dan Informatika dimana target yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 90,63% dapat tercapai sebesar 96,88%. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 3.7  
Capaian Realisasi IKU Tahun 2023 dan Target serta Realisasi IKU Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	96.88	90,63	96.88

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Sasaran Strategis Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 96,88% tidak terjadi peningkatan maupun penurunan karena nilainya sama dengan tahun 2023. Implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE dapat mendorong peningkatan penerapan SPBE di lingkungan Pemkot Pontianak. Keunggulan penerapan SPBE pada Pemkot Pontianak terutama pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Layanan

Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Penilaian dari pemerintah pusat bahwa hasil evaluasi penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Pontianak mendapat predikat baik dan untuk di Provinsi Kalbar kita yang tertinggi.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Penerapan SPBE pada Pemkot Pontianak secara umum sudah cukup baik, terutama pada tataran kebijakan dan layanan publik. Namun masih perlu adanya peningkatan dalam kematangan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan aspek audit TIK.

Tabel. 3.8  
Realisasi Indikator Kerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika  
Berdasarkan Perencanaan Strategis  
Tahun 2022-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			Target 2024
			2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	90.32	96.88	96.88	90,63

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE secara baik untuk Tahun 2022 sebesar 90,32%, sedangkan untuk Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 96,88% dan pada tahun 2024 sebesar 96,88%.

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi Pemerintah Kota Pontianak diantaranya yaitu adanya Layanan Perencanaan, Layanan

Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai. Semua layanan-layanan tersebut tersedia dalam bentuk aplikasi.

#### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Untuk penilaian persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE secara baik hanya ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sehingga untuk nilai ini belum dapat dibandingkan dengan Nilai Standar Nasional. Untuk Standar nasional hanya ada Nilai Indeks SPBE dimana nilai Standar Nasionalnya sebesar 2,79 dan nilai Indeks SPBE Kota Pontianak 3,49.

Tabel. 3.9  
Perbandingan IKU antara Realisasi Dengan Target Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024	Target Nasional
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	96.88	Tidak Ada

Realisasi pada Tahun 2024 pada Penilaian Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE secara baik sebesar 96,88% belum dapat dibandingkan dengan Target Nasional, karena Nasional tidak menargetkannya, akan tetapi hanya menargetkan Indeks

#### 5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.



Dalam melaksanakan hasil pekerjaan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dan Upaya mengatasi permasalahannya, adapun rincian permasalahan dan solusi dari permasalahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 3.10  
Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Belum memiliki/disusunnya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Kota Pontianak yang disesuaikan dengan Arsitektur & Peta Rencana SPBE Nasional	<p>Meningkatkan rapat koordinasi dan dibentuk Timdalam rangka percepatan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Pontianak. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan indicator tingkat kematangan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Pontianak, agar penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan secara matang, terencana, terstruktur dan bersinergi dengan Arsitektur SPBE Nasional (Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional).</p> <p>Meningkatkan kolaborasi dalam Penerapan SPBE pada level tertinggi aspek Penyelenggaraan SPBE sehingga lebih komprehensif dan lebih optimal</p>
2	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data, Tingkat Kematangan Penerapan	Perlu dilaksanakannya Manajemen Resiko SPBE Kota Pontianak sesuai dengan pedoman dan format yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3	Belum dilaksanakannya Audit Infrastruktur SPBE secara komprehensif sesuai dengan pedoman baik oleh auditor TIK Internal IPPD maupun auditor TIK Eksternal Tersertifikasi.	Melalui Tim Koordinasi dan Evaluator Internal SPBE akan berkoordinasi membentuk Tim Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
4	Jaringan intra yang terhubung masih pada 8 OPD yang berada lingkungan Komplek Kantor Wali Kota Pontianak	Tahun 2024 akan dilakukan pengembangan jaringan Intra pada OPD-OPD di jalan Aliyang, Sutoyo dan A. Yani sebagian. Adapun OPD-OPD tersebut antara lain: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Diskumdag, DPUPR, Dinkes, Dinsos, Disporapar, DPMPTSP, Kec Pontianak Selatan, Disdikbud, Disdukcapil, DPRKP, Bapenda, BKAD
5	Perlu dilakukan penyebarluasan informasi dan komunikasi terhadap masyarakat tentang informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) baik yang sudah terbentuk maupun yang masih terdata atau kurang aktif.</li> <li>• Dilakukan sosialisasi terhadap Masyarakat terkait dengan pengembangan wawasan tentang informasi publik</li> </ul>

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
6	Masih banyaknya data yang belum sesuai dengan standar data yang mengacu pada Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	Perlu dilakukan pelatihan/bimtek terkait dengan pengolahan data statistik sektoral yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Masih terdapat beberapa Indikator dalam kategori rendah pada penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Melaksanakan peningkatan pada Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang terdiri dari Lima Domain, 19 Aspek dan 38 Indikator, Salah Satu Domain yang Diampu Adalah Sistem Statistik Nasional (SSN) dengan cara dilakukan evaluasi dan review secara berkala oleh pembina data, walidata dan koordinator.

### Hambatan

- Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar OPD dalam Pelaksanaan e-government
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah
- Kurangnya kesadaran Organisasi Perangkat Daerah dalam pemenuhan daftar data dan daftar data prioritas Kota Pontianak

### Upaya

- Adanya penambahan anggaran dalam pengembangan jaringan dan aplikasi agar dapat terintegrasi.
- Penambahan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- Perlu dilakukan koordinasi secara rutin dan kontinyu terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak didukung dengan program kerja yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan, yang di anggaran yang tertuang dalam DPA Dinas Tahun 2024. Anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2024 sebesar Rp.12.238.087.000,- kemudian dilakukan perubahan anggaran sehingga anggaran bertambah sebesar Rp. 734.179.525,- dan menjadi Rp. 12.972.266.525,-. Dengan adanya perubahan anggaran ini maka ada beberapa Program yang bertambah dan berkurang, penambahan anggaran ini terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota berkaitan dengan Gaji PPPK sebanyak 15 orang, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika berkaitan dengan Jaringan Intra dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan sedangkan 2 Program lain mengalami pengurangan yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Tabel.3.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.123.379.508,00	7.159.669.075,00	88,14
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	638.003.540,00	607.494.107,00	95,22
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.697.364.677,00	3.582.876.179,00	96,90
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	372.408.800,00	369.900.700,00	99,33
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	141.118.000,00	125.999.614,00	89,29
<b>Total</b>		<b>12.972.266.525,00</b>	<b>11.845.939.675,00</b>	<b>91,32</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada total anggaran program sebesar Rp.11.845.939.675,00 atau 91,32% dari target anggaran sebesar Rp. 12.972.266.525,00. Adapun anggaran perprogram sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 8.123.379.508,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.159.669.075,00, atau 88,14%.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan anggaran sebesar Rp. 638.003.540,00 dan terealisasi sebesar Rp. 607.494.107,00, atau 95,22%
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 3.697.364.677,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.582.876.179,00, atau 96,90%
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp.372.400.800,00 dan dan terealisasi sebesar Rp.369.900.700,00, atau 99,33%
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp.141.118.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.125.999.614,00, atau 89,29%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hampir semua pada sub kegiatan pendukung terealisasi sebesar 90% sampai dengan 100% keatas. Hanya pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sebesar 65,49% dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar 88,82%, dan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi sebesar 80,73% karena lebih banyak menggunakan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk ke tiga sub kegiatan ini terjadi efisiensi anggaran. Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar 87,07% dikarenakan terlalu tinggi plottingan BKAD untuk anggaran gaji ASN.

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik rata-rata realisasi sub kegiatan mencapai 93% sampai dengan 99 %, Adapun untuk sub kegiatan Layanan

Hubungan Media terealisasi sebesar 87,68% dikarenakan realisasi kinerja sudah mencapai 100% jadi dapat dikategorikan terjadi efisiensi anggaran pada sub kegiatan tersebut.

Realisasi Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 96,90%, dimana beberapa sub kegiatannya memiliki serapan anggarannya yang baik di atas 94% sampai dengan 100%.

Sedangkan untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral realisasi anggarannya sebesar 99,33%, ini berarti hampir semua sub kegiatannya mencapai 100%.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan realisasi anggaran sebesar 89,29%, berarti sub kegiatan ini rata-rata diatas 85% sampai dengan 100%, dimana dengan capaian kinerja untuk kedua kegiatannya diatas 100%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024, sesuai dengan bidang tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak. Untuk mewujudkan misi RPJMD Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berkontribusi untuk pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2024 capaian kinerja program menunjukkan rata-rata sebesar 113,33% sedangkan capaian kinerja sub kegiatan menunjukkan rata-rata sebesar 100%. Dana yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melaksanakan seluruh program / kegiatan / sub kegiatan adalah sebesar Rp.11.845.939.675,- atau 91,32% dari anggaran sebesar Rp.12.972.266.525,-. Target kinerja outcome maupun output yang telah ditetapkan pada Renstra 2024-2026 secara keseluruhan dapat disimpulkan tercapai.

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis pada bab terdahulu, maka secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, telah dapat merealisasi pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2024. Adapun pencapaian secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sasaran Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika yakni Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sedangkan untuk Indikator Kerja Utama (IKU) berupa Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik ditargetkan Tahun 2024 dengan nilai 90,63% dengan realisasi sebesar 96,88% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 106,90%. Capaian ini dapat dikatakan **Sangat Berhasil** dan untuk efisiensi anggaran setiap programnya Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mengefisienkan anggaran yang ada atau dikategorikan **Sangat Efisien** dan dengan capaian kinerja yang di atas 100% atau rata-rata 113,33%.
- b. Urusan penunjang pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak didukung oleh 1 program dimana pelaksanaan program tersebut dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.123.379.508,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.159.669.075,00- atau 88.14%. Dimana tingkat realisasi kinerja program sebesar 99,07% dari target kinerja sebesar 95% ini dapat kategori **Sangat Berhasil** dan untuk tingkat efesiensi pengelolaan anggaran dapat di kategorikan **Sangat Efisien** dengan nilai capaian kinerja sebesar 104.28 %.

Secara umum realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

## 4.2 Saran

1. Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak pada tahun 2024 mempunyai beberapa kendala. Untuk pelaksanaan pengadaan barang, perubahan harga barang serta tidak tersedianya barang yang dibutuhkan menjadi salah satu faktor



penghambat realisasi kegiatan maupun anggaran. Walaupun secara keseluruhan pencapaian kinerja yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak dapat dilaksanakan secara baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Pelaksanaan penyebaran informasi kepada masyarakat yang seharusnya dilaksanakan secara langsung, berubah pelaksanaannya. Penyebaran informasi dilaksanakan melalui media-media online berupa media social, website dan lainnya, tidak menggunakan media konvensional lainnya. Minimnya anggaran juga menyebabkan kurang optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat.
3. Untuk tetap dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan, diantaranya:
  - a. Perlu dilakukan peningkatan kapabilitas ASN dengan bimbingan teknis dan pelatihan teknis maupun umum
  - b. Pembangunan jaringan intra pemerintah daerah merupakan salah satu komponen penting penilaian SPBE, sehingga perlu mendapat alokasi anggaran yang cukup besar untuk dapat menyediakan jaringan intra pemerintah daerah.
  - c. Mengoptimalkan peran masyarakat yang sudah terbentuk melalui fasilitasi kegiatan yang tertuang dalam program kebijakan pemerintah.
  - d. Evaluasi intensif dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan sehingga dapat mengantisipasi hambatan / masalah dalam pelaksanaan.



## LAMPIRAN

Formulir Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Tahun Anggaran : 2024

No	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	%	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8,123,379,508.00</b>	<b>7,159,669,075.00</b>	<b>88.14</b>	<b>95.00</b>	<b>persen</b>	<b>99</b>	<b>persen</b>	<b>104.28</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>38,039,900.00</b>	<b>37,322,000.00</b>		<b>100.00</b>	<b>persen</b>	<b>100.00</b>	<b>persen</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,607,900.00	11,355,000.00		6	Dokumen	6	Dokumen	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,489,800.00	6,365,000.00		1	Dokumen	1	Dokumen	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,000,600.00	6,855,000.00		1	Dokumen	1	Dokumen	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,179,200.00	7,057,500.00		4	Laporan	4	Laporan	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,762,400.00	5,689,500.00		2	Laporan	2	Laporan	
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,838,852,925.00</b>	<b>5,080,081,759.00</b>		<b>100.00</b>	<b>Persen</b>	<b>97.58</b>	<b>Persen</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,633,066,525.00	4,904,973,759.00		31	Orang / Bulan	28	Orang / Bulan	



1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	198,221,600.00	167,653,000.00		12	Dokumen	12	Dokumen	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,407,400.00	2,345,000.00		1	Laporan	1	Laporan	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,157,400.00	5,110,000.00		12	Laporan	12	Laporan	
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>81,207,000.00</b>	<b>77,559,016.00</b>		<b>100.00</b>	<b>Persen</b>	<b>100.00</b>	<b>Persen</b>	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	62,280,000.00	62,280,000.00		1	Paket	1	Paket	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18,927,000.00	15,279,016.00		3	orang	3	orang	
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>429,670,840.00</b>	<b>359,989,499.00</b>		<b>100.00</b>	<b>persen</b>	<b>98.21</b>	<b>persen</b>	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,850,840.00	8,814,500.00		1	Paket	1	Paket	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78,170,200.00	74,922,000.00		5	Paket	5	Paket	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,635,000.00	99,635,000.00		8	Paket	7	Paket	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,017,800.00	27,012,000.00		1	Paket	1	Paket	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,420,000.00	6,820,000.00		12	Dokumen	12	Dokumen	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190,627,000.00	124,835,999.00		2	Laporan	2	Laporan	



1.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17,950,000.00	17,950,000.00		5	Dokumen	5	Dokumen	
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>557,600,195.00</b>	<b>546,754,400.00</b>		<b>100.00</b>	<b>Persen</b>	<b>100.00</b>	<b>Persen</b>	
1.5.1	Pengadaan Mebel	20,426,800.00	18,760,000.00		16	unit	16	unit	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	537,173,395.00	527,994,400.00		20	Unit	20	Unit	
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,067,288,648.00</b>	<b>949,610,901.00</b>		<b>100.00</b>	<b>Persen</b>	<b>100.00</b>	<b>Persen</b>	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,221,600.00	5,220,000.00		1	Laporan	1	Laporan	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	786,590,000.00	698,646,733.00		1	Laporan	1	Laporan	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275,477,048.00	245,744,168.00		1	Laporan	1	Laporan	
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>110,720,000.00</b>	<b>108,351,500.00</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37,900,000.00	37,851,500.00		2	unit	2	unit	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62,670,000.00	60,560,000.00		92	unit	92	unit	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,150,000.00	9,940,000.00		1	unit	1	unit	



<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>638,003,540.00</b>	<b>607,494,107.00</b>	<b>95.22</b>	<b>70.00</b>	<b>Persen</b>	<b>98.98</b>	<b>Persen</b>	<b>141.40</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>638,003,540.00</b>	<b>607,494,107.00</b>		<b>13</b>	<b>Media</b>	<b>13</b>	<b>Media</b>	
2.2.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	41,782,000.00	41,375,000.00		4	Dokumen	4	Dokumen	
2.2.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	235,866,500.00	231,448,667.00		12	Dokumen	12	Dokumen	
2.2.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	36,840,000.00	34,480,000.00		2	Dokumen	2	Dokumen	
2.2.4	Pelayanan Informasi Publik	68,857,640.00	68,364,840.00		12	Dokumen	12	Dokumen	
2.2.5	Layanan Hubungan Media	149,070,000.00	130,710,000.00		4	Layanan	4	Layanan	
2.2.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	76,435,600.00	73,105,500.00		2	Dokumen	2	Dokumen	
2.2.7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	29,151,800.00	28,010,100.00		1	Dokumen	1	Dokumen	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>3,697,364,677.00</b>	<b>3,582,876,179.00</b>	<b>96.90</b>	<b>95.52</b>	<b>Persen</b>	<b>97.50</b>	<b>Persen</b>	<b>102.07</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>906,845,122.00</b>	<b>881,092,251.00</b>		<b>32</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>32</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	



3.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	126,480,000.00	118,048,251.00		1	Dokumen	1	Dokumen	
3.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	780,365,122.00	763,044,000.00		1	Unit	1	Unit	
<b>3.2</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,790,519,555.00</b>	<b>2,701,783,928.00</b>		<b>32</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>30</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	
3.2.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2,466,323,715.00	2,385,713,288.00		1	Unit	1	Unit	
3.2.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	56,385,840.00	56,385,840.00		3	Unit	3	Unit	
3.2.3	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	67,170,000.00	64,519,800.00		5	Layanan	5	Layanan	
3.2.4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	52,250,000.00	49,250,000.00		1	Dokumen	1	Dokumen	
3.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	53,960,000.00	51,485,000.00		1	Dokumen	1	Dokumen	
3.2.6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	94,430,000.00	94,430,000.00		1	Dokumen	1	Dokumen	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>372,400,800.00</b>	<b>369,900,700.00</b>	<b>99.33</b>	<b>53.85</b>	<b>persen</b>	<b>64.02</b>	<b>persen</b>	<b>118.89</b>
<b>4.1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>372,400,800.00</b>	<b>369,900,700.00</b>		<b>100.00</b>	<b>persen</b>	<b>100.00</b>	<b>persen</b>	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	51,285,000.00	51,285,000.00		3	Dokumen	3	Dokumen	



	dan Diseminasi Data Statistik Sektoral								
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	31,706,000.00	31,706,000.00		32	Orang	32	Orang	
4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	46,470,500.00	46,470,500.00		2	Dokumen	2	Dokumen	
4.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	57,160,800.00	56,610,800.00		32	Orang	32	Orang	
4.1.5	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	185,778,500.00	183,828,400.00		3	Dokumen	3	Dokumen	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>141,118,000.00</b>	<b>125,999,614.00</b>	<b>89.29</b>	<b>21.88</b>	<b>Persen</b>	<b>21.88</b>	<b>Persen</b>	<b>100.00</b>
<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>131,118,000.00</b>	<b>117,099,614.00</b>		<b>26.87</b>	<b>Persen</b>	<b>33.58</b>	<b>Persen</b>	
5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7,000,000.00	7,000,000.00		1	Dokumen	1	Dokumen	
5.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12,000,000.00	8,755,000.00		1	Laporan	1	Laporan	
5.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	109,668,000.00	98,894,614.00		1	Laporan	1	Laporan	
5.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,450,000.00	2,450,000.00		5	Perangkat Daerah	5	Perangkat Daerah	



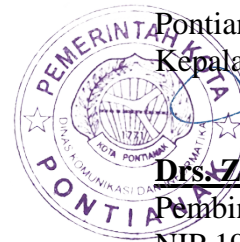
5.2	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>8,900,000.00</b>		<b>47.88</b>	<b>Persen</b>	<b>50.00</b>	<b>Persen</b>	
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000.00	8,900,000.00		5	Perangkat Daerah	5	Perangkat Daerah	

Jumlah Total anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 12,972,266,525.00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 11,845,939,675.00

Pontianak, 14 Februari 2025

Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pontianak



**Drs. ZULKARNAIN, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP 196601271986031009